Hukum Acara Pidana.

Putusan yang mengandung pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh Jaksa, kecuali dapat dibuktikan dalam memori bandingnya bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni.

Putusan Mahkamah Agung tg. 28 Maret 1970 No. 19 K/Kr/1969.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Maret 1965 No. 134/1965-Sumir, dalam putusan mana para terdakwa:

1. *Machmud Kahar*, umur kira-kira 44 tahun, lahir di Makassar, bertempat tinggal di Jalan Bete-bete Lorong 65A No. 44 Makassar, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Makassar;
2. *Husen Nud*, umur kira-kira 43 tahun, lahir di Makassar, bertempat tinggal di Jalan Andalas No. 204 Makassar, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Makassar;
3. *Zulkifli Amin*, umur kira-kira 29 tahun, lahir di Palembang, bertempat tinggal terakhir di Pasanggrahan Makassar, Jalan Somba Opu No...., pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Makassar;
4. *Jo Tjong Leng*, umur kira-kira 23 tahun, lahir di Makassar, bertempat tinggal di Jalan Irian No. 5 Makassar, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Makassar;
5. *Mansjur*, umur kira-kira 37 tahun, lahir di Makassar, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawakara Eng No. 56A, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Makassar;
6. *Gatot Hadisuwondo*, umur kira-kira 36 tahun, lahir di Jawa Tengah, bertempat tinggal terakhir di Jalan Jampea No. 4 Makassar, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Makassar;
7. *Nurdin Kasim*, umur kira-kira 43 tahun, lahir di Makassar, bertempat tinggal di Jalan Sarappo No. 114 Makassar, pekerjaan pegawai Bea dan Cukai Makassar;
8. *Marthinus Agustinus Patty*, umur kira-kira 35 tahun, lahir di Gowa, bertempat tinggal di Jalan Pelanduk No. 2 Makassar, pekerjaan Pegawai Direktorat Export Cabang Makassar;
9. *Thio Hoei Tjoan*, umur kira-kira 38 tahun, lahir di Makassar, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 16 Makassar, pekerjaan Agen PN Djakarta Lloyd Cabang Makassar;

para penuntut-kasasi (pernah berada dalam tahanan sementara); yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

1. Terhadap semua tersangka:

“Bahwa mereka tersangka-tersebut dalam tahun 1964 pada bulan Pebruari, sampai dengan bulan Agustus 1964 yang hari dan tanggalnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dalam tahun 1964, di pelabuhan Makassar dalam gedung-gedung Djakarta Lloyd Makassar, di tempat bekerja para tersangka di Makassar, ataupun di rumah tempat tinggal para tersangka di Makassar, ataupun di suatu tempat lain dalam kota Besar Makassar, atau salah suatu tempat dalam Wilayah Republik Indonesia, mereka tersangka-tersebut, baik bersama-sama melakukannya atau bertindak sendiri-sendiri terpisah satu sama dengan yang lainnya mereka tersangka-tersebut telah melakukan tindak-pidana korupsi yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat, setidak-tidaknya perbuat-perbuatan mereka tersangka-tersebut yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan, mereka tersangka-tersebut melakukannya dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukan, yakni mereka tersangka-tersebut:

- 1) Machmud Kahar, dan
- 2) Husen Nud, masing-masing pada bulan Juni 64 dan Juli 1964 dalam kedudukannya sebagai Pegawai Bea Cukai di Makassar, bertindak sebagai pemeriksa dan penimbang atas barang-barang ekspor kopra kepunyaan PT Aneka Karja Cabang Makassar, sebanyak partai 400 ton netto DMB (Daftar Muat Barang) No. 1084/c tanggal 5-6-1964 untuk muatan kapal Anne Reed, dan partai 500 ton netto kopra DMB No. 1298/c tgl. 2-7-1964 dan partai 600 ton netto kopra DMB No. 1317/c tgl. 4-7-1964 untuk muatan kapal Sam Ratulangi, untuk memeriksa mengenai kwantiteitnya (banyaknya timbangannya), di mana dalam menjalankan tugas mereka, tidak dilakukan sebagaimana mustinya, yakni mereka ini hanya melakukan penimbangan 2-3% dari jumlah seluruhnya, sedang menurut kebiasaan semestinya ditimbang 15 sampai 20%, sehingga menyebabkan merugikan perekonomian negara, sebagai halnya dengan peristiwa pembongkaran muatan Kapal Karen Reed pada bulan Agustus/September 1964 yang didapat kelebihan timbangan sebanyak lebih 500 ton netto kopra, dan tegen prestasi dari kelancaran-kelancaran penimbangan yang tidak betul itu, mereka ini menerima uang kelancaran dari saksi Tan Sui Eng alias Otje sebanyak Rp.25.000,- untuk tersangka satu untuk muatan kapal Anne Reed, yang diterimanya dua hari setelah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Makassar,

dan untuk tersangka dua, Husen Nud, menerima uang kelancaran sebanyak Rp.20.000,- yang diterimanya dua kali berturut-turut, yakni pertama di gudang Djakarta Lloyd di pelabuhan Makassar dari saksi Tan Sui Eng alias Otje sebanyak Rp.10.000,- pada waktu ia sementara melakukan penimbangan kopra di pelabuhan tersebut dan Rp.10.000,- lagi langsung diterima dari saksi Leng Wuisang di kantornya setelah dua hari kapal Sam Ratulangi berangkat meninggalkan pelabuhan Makassar;

3) Zulkifli Amin, sebagai Hungger Cheff pada bulan Juni-Juli 1964, telah memerintahkan tersangka 1, Machmud Kahar untuk menimbang kopra PT Aneka Karja Cabang Makassar partai 400 ton netto untuk muatan kapal Anne Reed tersebut di atas, dan ke pada tersangka Husen Nud, ditugaskan untuk menimbang partai 500 dan 600 ton netto untuk muatan kapal Sam Ratulangi tersebut juga di atas, dengan tidak memberikan petunjuk dan pengawasan sebagaimana mustinya, karena ia mengharapkan sesuatu atau sehubungan dengan itu ia tersangka telah menerima uang kelancaran sebanyak Rp.50.000,- dari saksi Tan Sui Eng alias Otje, beberapa hari setelah kapal Anne Reed dan Sam Ratulangi berangkat meninggalkan pelabuhan Makassar, yang diterimanya di gudang Djakarta Lloyd No. 10 kira-kira jam 10.00 siang, uang mana diterima dalam keadaan terbungkus dengan envelop;

4) Jo Tjong Liong, yang mengepalai anggota-anggota Dinas Luar Khusus yang melakukan penimbangan, tidak mencegah dan menegor para anggota-anggotanya yang melakukan pemeriksaan dan penimbangan atas karung-karung yang lembek dan kurang isinya yang dilakukan oleh tersangka-tersangka Machmud Kahar dan Husen Nud, bertempat di gudang Djakarta Lloyd di pelabuhan Makassar, dan sehubungan dengan itu ia tersangka telah menerima uang kelancaran dari saksi Tan Sui Eng alias Otje sebanyak Rp.50.000,- di rumah tersangka yang dibawa sendiri oleh saksi tersebut ke rumah tersangka, setelah seminggu kapal Sam Ratulangi berangkat meninggalkan pelabuhan Makassar;

5) Mansjur, pada bulan Juli 1964, ia bertindak sebagai pemeriksa untuk menimbang kopra partai 500 ton netto DMB No. 1320/c tanggal 9-7-1964 kepunyaan PT Aneka Karja Cabang Makassar, bertempat di gudang Djakarta Lloyd Makassar untuk muatan kapal Setia Budhi, pemeriksaan dan penimbangan mana yang dilakukan oleh tersangka, ia tersangka tidak melakukannya tugasnya sebagaimana mustinya, yakni ia hanya menimbang karung-karung yang lembek dan kurang isinya, dan sebagai tegan prestasi yang sehubungan dengan tugasnya itu, ia tersangka telah mendapat uang kelancaran sebanyak Rp.50.000,- dari saksi Tan Sui Eng alias Otje, yang diterimanya dua kali berturut-turut, yakni pertama Rp.25.000,- diterima di rumahnya di Jln. Gunung Bawakaraeng 56A Makassar yaitu pada hari kedua sewaktu masih sementara mengadakan penimbangan kopra tersebut, dan kedua yaitu hari keberangkatan kapal Setia Budhi, diterima lagi Rp.25.000,- di

- Kantor saksi Tan Sui Eng alias Otje di Jln. Nusantara 163 Makassar;
- 6) Gatot Hadisuwondo, sebagai Hungger Cheff di gudang Djakarta Lloyd Makassar pada bulan Agustus 1964, ia telah memerintahkan ke pada Nurdin Kasim untuk melakukan pemeriksaan dan penimbangan partai 2000 ton netto kopra kepunyaan PT Aneka Karja Makassar untuk muatan kapal Karen Reed, menyimpang dari prosedur yang biasa dilakukan, yakni memerintahkan untuk memeriksa dan menimbang kopra-kopra tersebut sebelum dokumen-dokumennya lengkap dan tidak memberikan petunjuk-petunjuk serta tidak mengadakan kontrol/pengawasan terhadap tugas-tugas yang dibebankan ke pada bawahannya, Nurdin Kasim tersebut yang mengakibatkan dalam penimbangan kopra itu terdapat kelebihan timbangan, lebih 500 ton netto kg. dan sehubungan dengan itu ia tersangka telah mendapat tegen prestasi berupa janji untuk memperoleh uang balas jasa atau uang kelancaran dari PT Aneka Karja Makassar, apabila kapal Karen Reed telah berangkat meninggalkan pelabuhan Makassar;
 - 7) Nurdin Kasim, pada bulan Agustus 1964 bertindak sebagai pemeriksa dan penimbang atas perintah Hungger Cheff, Gatot Hadisuwondo, untuk memeriksa dan menimbang 4 partai kopra masing-masing tiap partai 500 ton netto kopra atas DMB-DMB No. 1808, 1809, 1810, 1811/c kepunyaan PT Aneka Karja Makassar untuk muatan kapal Karen Reed, yang melakukan penimbangan tidak sebagaimana mestinya, tidak betul, ia tersangka hanya menimbang karung-karung yang lembek dan kurang isinya, yang menyebabkan terdapat kelebihan timbangan 544.476,5 kg netto untuk keempat partai tersebut dan sehubungan dengan itu sebagai tegen prestasi ia telah memperoleh janji untuk mendapat/menerima sejumlah uang kelancaran atau uang jasa dari PT Aneka Karja Makassar, melalui saksi Otje tersebut di atas;
 - 8) Marthinus Agustinus Patty, salah seorang petugas di Kantor Ekspor Cabang Makassar, yang melakukan tugas-tugas Administrasi dalam mengurus/mengerjakan dan menetapkan Chek Price (harga ancer-ancer) untuk barang-barang ekspor ke luar negeri, ia tersangka telah mengerjakan atau setidaknya telah menetapkan chek price yang rendah antara 10-15% dari penawaran Herman Lie alias Lie Kiem Seng dari PT Aneka Karja Cabang Makassar, yang lebih rendah dari Chek Price yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan (Pusat) Jakarta, dan sehubungan dengan itu ia tersangka telah memperoleh atau menerima sejumlah uang dari Herman Lie alias Lie Kiem Seng sebanyak Rp.400.000,- dan Rp 175.000,- dalam hubungan dengan penutupan ekspor bungkil/kopra PT Aneka Karja Cabang Makassar, dan fasilitas keuangan sebagai pinjaman untuk Fa. Lease Makassar sebanyak Rp 1.000.000,- dari saksi Herman Lie alias Lie Kiem Seng dan Rp 1.500.000,- dari Jap I Kong di Jakarta, Direktur PT Aneka Karja Pusat di Jakarta;
 - 9) Thio Hoei Tjoang, Pimpinan Agen perkapalan PN Djakarta Lloyd

Makassar, telah memuat kopra PT Aneka Karja Cabang Makassar atas 4 kapal, yakni kapal-kapal Anne Reed, Sam Ratulangi, Setia Budhi dan Karen Reed, dengan tidak melaporkan atas kelebihan muatan kopra dari Anne Reed, Sam Ratulangi, Setia Budhi, karena ia tersangka telah mendapat uang pengaruh atau uang kelancaran sebanyak Rp.200.000,- untuk kepentingan fasilitas pemuatan kopra kepunyaan PT Aneka Karja Cabang Makassar, yang diterimanya dari Jap I Kong di Jakarta pada bulan Juli 1964;

perbuatan-perbuatan mana dari tersangka-tersangka tersebut di atas ini, adalah suatu perbuatan yang berusaha untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara di bidang Devisen negara, setidaknya mereka tersangka-tersangka berusaha untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukan mereka para tersangka?;

2. Terhadap semua tersangka:

'Bahwa mereka tersangka-tersangka pada waktu dan tempat sebagai tersebut pada tuduhan satu di atas, mereka tersangka-tersangka adalah pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang mereka tahu atau patut dapat menyangka bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya atau menurut perkiraan orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, setidaknya-diketuainya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya, setidaknya-tidaknya bahwa pemberian itu diberikan ke padanya oleh karena atau berhubung dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya, dengan cara dan peranan atau perbuatannya masing-masing melakukan sebagai berikut:

- 1) Machmud Kahar, dan
- 2) Husen Nud,

masing-masing bertindak sebagai pemeriksa dan penimbang atas partai 400 ton dan 500 ton serta 600 ton netto kopra PT Aneka Karja Cabang Makassar untuk muatan kapal Anne Reed dan kapal Sam Ratulangi untuk diekspor ke luar negeri Eropah, di mana dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai pemeriksa dan penimbang, tidak dilakukan sebagaimana mustinya, tidak betul cara melakukan penimbangan, yakni mereka hanya menimbang karung-karung yang lembek dan kurang isinya dan mereka hanya menimbang hanya 2-3% tiap-tiap partai, sedang semestinya menurut kebiasaan 20-30% harus ditimbang, hal itu dilakukan sedemikian itu, karena mereka telah mendapat pengaruh, janji untuk memperoleh uang kelancaran dari PT Aneka Karja Makassar (saksi Tan Sui Eng alias Otje), dan tersangka Machmud Kahar, telah menerima uang hadiah dari saksi Tan Sui Eng alias Otje tersebut sebesar Rp.25.000,-

setelah dua hari berangkatnya kapal Anne Reed, meninggalkan pelabuhan Makassar yang memuat 400 ton kopra PT Aneka Karja tersebut menuju Eropah (Hamburg), dan tersangka Husen Nud, telah menerima uang Rp.20.000,- dari saksi Tan Sui Eng alias Otje yang diterimanya dua kali berturut-turut, yakni Rp.10.000,- diterima pada waktu masih sementara menimbang kopra di gudang Djakarta Lloyd Makassar, dan Rp.10.000,- lagi diterima dari saksi Leng Wuisang di Kantornya setelah dua hari berangkatnya kapal Sam Ratulangi meninggalkan pelabuhan Makassar;

- 3) Zulkifli Amin, sebagai Hungger Cheff pada bulan Juni-Juli 1964 telah memerintahkan tersangka Machmud Kahar dan Husen Nud untuk memeriksa dan menimbang partai 400 ton kopra PT Aneka Karja Makassar untuk muatan kapal Anne Reed dan 500 ton kopra untuk muatan Sam Ratulangi, dengan tidak memberikan petunjuk bagaimana cara melakukan penimbangan kopra-kopra tersebut dan tidak mengadakan pengawasan sebagaimana mustinya, dan sehubungan dengan itu ia telah menerima pemberian atau hadiah uang Rp.50.000,- dari saksi Tan Sui Eng alias Otje beberapa hari setelah kapal Anne Reed dan Sam Ratulangi meninggalkan pelabuhan Makassar, sebagai uang kelancaran, atau hadiah, karena ia telah mengalpakan pengawasan yang diperlukan dan tidak memberikan petunjuk semestinya;
- 4) Jo Tjiong Lieng, mengepalai anggota-anggota dinas luar khusus yang melakukan penimbangan (tersangka Machmud Kahar, Husen Nud, Mansjur, Nurdin Kasim), ia tersangka tidak mencegah dan menegor para anggota penimbang, di antaranya Husen Nud, yang melakukan penimbangan karung-karung kopra yang lembek dan kurang isinya setidak-tidaknya tersangka telah mengalpakan kewajibannya dan sehubungan dengan itu ia telah menerima pemberian atau hadiah di rumahnya tersangka sebagai uang kelancaran sebanyak Rp.50.000,- dari saksi Tan Sui Eng alias Otje, beberapa hari kemudian setelah kapal Sam Ratulangi berangkat meninggalkan pelabuhan Makassar;
- 5) Mansjur, pada akhir bulan Juli 1964 bertindak sebagai pemeriksa dan menimbang muatan kopra partai 500 ton netto kepunyaan PT Aneka Karja Makassar muatan kapal Setia Budhi, bertempat di gudang PN Djakarta Lloyd Makassar, ia tersangka tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, yakni ia tersangka hanya menimbang karung-karung kopra yang lembek dan kurang isinya, setidak-tidaknya tersangka telah mengalpakan kewajibannya dan sehubungan dengan itu ia tersangka telah menerima pemberian hadiah berupa uang kelancaran dari saksi Tan Sui Eng alias Otje sebanyak Rp.50.000,- yang diterimanya dua kali berturut-turut, yaitu pertama diterima Rp.25.000,- di rumahnya di Jln. G. Bawakaraeng 56A Makassar, yaitu pada hari kedua sewaktu masih menimbang kopra, dan yang kedua yaitu hari keberangkatan kapal Setia Budhi diterima Rp.25.000,- di Kantor saksi Tan Sui Eng alias Otje di Jln. Nusantara 163 Makassar;

- 6) Gatot Hadisuwondo, sebagai Hungger Cheff di gudang PN Djakarta Lloyd Makassar pada bulan Agustus 1964 ia telah memerintahkan ke pada tersangka Nurdin Kasim untuk menimbang dan memeriksa partai 2000 ton netto kopra kepunyaan PT Aneka Karja Makassar untuk muatan kapal Karen Reed, yang melakukan proses (behandeling) menyimpang dari cara-cara tehnik yang biasa dilakukan, yakni ia memerintahkan memeriksa kopra-kopra tersebut sebelum lengkap dokumen-dokumennya dan tidak memberikan petunjuk-petunjuk serta tidak mengadakan kontrole/pengawasan tugas-tugas penimbangan yang dilakukan oleh tersangka Nurdin Kasim, yang mengakibatkan dalam penimbangan itu didapat berat rata-rata 59,3 kg. per karung, sedang berat rata-rata setelah dilakukan penimbangan ulang oleh suatu Team Penimbang yang memeriksa timbangannya kembali, terdapat berat rata-rata 70-75 kg. per karung, sehingga mengakibatkan kelebihan timbangan sebanyak 544.476,5 kg. netto untuk keseluruhan 4 partai tersebut di atas, hal mana disebabkan karena ia tersangka mendapat pengaruh atau janji dari saksi Tan Sui Eng alias Otje untuk memperoleh uang kelancaran atau uang balas jasa, sebagaimana halnya dengan kawan-kawan yang lainnya yang tersangkut dalam persoalan kapal Anne Reed, Sam Ratulangi dan Setia Budhi;
- 7) Nurdin Kasim, pada bulan Agustus 1964 bertindak sebagai pemeriksa dan penimbang atas kopra-kopra kepunyaan PT Aneka Karja Cabang Makassar atas perintah Hungger Cheff Gatot Hadisuwondo, untuk menimbang 4 partai kopra masing-masing beratnya 500 ton netto untuk tiap partai, untuk muatan kapal Karen Reed, yang melakukan penimbangan tidak sebagaimana mustinya, tidak betul, karena ia tersangka hanya menimbang karung-karung yang lembek dan kurang isinya yang terdapat berat rata-rata 59,3 kg per karung, sedang berat rata-rata setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan ulang oleh suatu Team Penimbang, terdapat kelebihan berat rata-rata 70-75 kg. per karung, sehingga mengakibatkan kelebihan timbangan 500 ton lebih (=544.476,5 kg) untuk keseluruhan partai 2000 ton netto tersebut, hal mana disebabkan karena ia tersangka telah mendapat pengaruh atau janji dari saksi Tan Sui Eng alias Otje untuk memperoleh sejumlah uang jasa atau uang kelancaran, janji mana berbunyi:
timbang saja, itu di atas sudah beres, artinya: di atas=atasan sudah beres = uang. Jadi maksudnya kalau sudah selesai ditimbang dengan cepat, ia akan diberi uang oleh saksi tersebut, berapa banyaknya tidak ditentukan oleh saksi, tetapi akan diberikan yang memuaskan sebagaimana kawan-kawannya dalam persoalan Anne Reed, Sam Ratulangi dan Setia Budhi;
- 8) Marthinus Agustinus Patty, seorang petugas di Kantor Ekspor Cabang Makassar, yang mempunyai tugas-tugas administrasi mengerjakan permohonan-permohonan Chek Price untuk barang-barang ekspor dari eksportir PT Aneka Karja Makassar, Herman Lie alias Lie Kiem Seng, ia tersangka telah mengerjakan setidak-tidaknya

telah menetapkan cek price yang rendah antara 10-15% di bawah harga yang ditetapkan oleh Pemerintah (Menteri Perdagangan) Jakarta untuk penawaran Herman Lie alias Lie Kiem Seng tersebut, perbuatan mana ia tersangka melakukannya karena sehubungan dengan itu ia tersangka telah mendapat pengaruh, menerima janji, pemberian atau hadiah uang sebanyak Rp.575.000,- dari saksi Herman Lie alias Lie Kiem Seng, yang diterimanya dua kali berturut-turut yakni Rp.400.000,- dan Rp.175.000,- masing-masing diterima di rumahnya tersangka, setidak-tidaknya dia tersangka telah memberikan pelayanan yang memuaskan atau bantuan-bantuan atau petunjuk-petunjuk ke pada saksi Herman Lie dari PT Aneka Karja Cabang Makassar untuk menghindari kesulitan-kesulitan, karena ia tersangka mengharapkan untuk mendapat fasilitas keuangan dari PT Aneka Karja Cabang Makassar baik untuk dirinya sendiri sebanyak Rp.575.000,- maupun untuk orang lain atau badan hukum lainnya, yakni Fa. Lease Makassar sebanyak Rp.2.500.000,- yang telah diterima oleh tersangka sendiri dari saksi Lie Kiem Seng alias Herman Lie;

9) Thio Hoesi Tjoang, agen perkapalan PN Djakarta Lloyd Makassar, telah memuat kopra PT Aneka Karja Makassar atas 4 kapal, yakni kapal-kapal Anne Reed, Sam Ratulangi, Setia Budhi dan Karen Reed, dengan tidak melaporkan atas kelebihan muatan kopra dari PT Aneka Karja tersebut yang dimuat pada ke-4 kapal tersebut di atas, karena ia tersangka telah mendapat uang pengaruh, uang pemberian atau hadiah dari saksi Jap I Kong di Jakarta pada bulan Juli 1964 sebanyak Rp.200.000,- sebagai uang kelancaran, sedang ia tersangka atau para tersangka-tersangka tersebut di atas ini tahu atau patut dapat menyangka bahwa uang-uang hadiah tersebut atau janji-janji tersebut adalah berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya sebagai pegawai negeri, yang menurut perkiraan orang yang menghadihkan uang-uang itu ada hubungan dengan jabatannya, setidak-tidaknya uang pemberian tersebut adalah untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan atau telah mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya;

Melanggar pasal-pasal: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 pasal-pasal 1a, b dan c dan pasal 16 jo, pasal 418, 419 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;

dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan Hukum yang bersangkutan, telah dinyatakan tidak bersalah seperti tercantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan, bahwa terhadap terdakwa-terdakwa:

- I. Mahmud Kahar,
- II. Husen Nud,
- III. Zulkifli Amin,
- IV. Jo Tjiong Leng,

- V. Mansjur,
- VI. Gatot Hadisuwondo,
- VII. Nurdin Kasim,
- VIII. Marthinus Agustinus Patty,
- IX. Thio Hoei Tjoan,

pemeriksaan di muka sidang Pengadilan tidak memperoleh bukti-bukti yang syah dan meyakinkan tentang kesalahan mereka atas kejahatan yang dituduhkan pada mereka;

Membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut dari tuduhan di atas ini (Vrijspraak);

Memerintahkan pada Jaksa supaya terdakwa-terdakwa I sampai dengan VIII segera dibebaskan dari tahanan, kecuali jika mereka harus tetap tinggal dalam tahanan karena lain perkara;

Membebaskan segala ongkos dalam perkara ini pada Negara;

Memerintahkan, supaya barang-barang-bukti yang berupa uang kontan Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan ke pada saksi Tan Sui Eng alias Otje dan wang kontan Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Firma Lease”;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Makassar telah dibatalkan dengan putusannya tanggal 29 Januari 1966 No. 12/1965/PT/Pid. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Makassar tertanggal 8 Maret 1965, pidana No. 134/1965 (Summier) yang dimohonkan peradilan banding itu;

3. Dan dengan memberi keputusan sendiri:

Menyatakan bahwa, terdakwa-terdakwa:

- I. Mahmud Kahar,
- II. Husen Nud,
- III. Zulkifli Amin,
- IV. Jo Tjiong Leng,
- V. Mansjur,
- VI. Gatot Hadisuwondo,
- VII. Marthinus Agustinus Patty,
- VIII. Thio Hoie Tjoan,

masing-masing telah bersalah melakukan tindak-pidana korupsi yang berupa:

“Menerima hadiah pada hal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat karena ia tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;

VII. Nurdin Kasim,

telah bersalah melakukan tindak-pidana korupsi yang berupa:

“Menerima janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk menggerakkan ia supaya tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”;

4.a.) Menghukum oleh karena itu ke pada terdakwa-terdakwa:

- I. Mahmud Kahar,
- II. Husen Nud,
- III. Zulkifli Amin,
- IV. Jo Tjiong Leng,
- V. Mansjur,
- VI. Gatot Hadisuwondo,
- VIII. Marthinus Agustinus Patty,
- IX. Thio Hoei Tjoang,

masing-masing dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama mereka berada dalam tahanan sementara;

b). Menghukum terdakwa VII. Nurdin Kasim tersebut, dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan, bahwa hukuman ini tidak akan dijalani oleh terdakwa tersebut, kecuali jika kemudian diperintahkan lain dalam suatu putusan pengadilan karena terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan 2 (dua) tahun telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana;

5. Menetapkan, bahwa barang-bukti berupa:

a) wang kontan sebanyak Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah),

b) wang kontan sebanyak Rp.2.500.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah),

disita untuk Negara;

6. Menghukum para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara;

7. Memerintahkan supaya sehelai turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara ini dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar di Makassar”;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Makassar

1. No.19/1966,
2. No.20/1966,
3. No.16/1966,
4. No.14/1966,
5. No.18/1966,
6. No.17/1966,
7. No.15/1966,
8. No.21/1966,

masing-masing yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 1966 terdakwa I. Machmud Kahar, terdakwa II. Husen Nud, pada tanggal 29 Juli 1966, terdakwa V. Mansjur, terdakwa VII. Nurdin Kasim, pada tanggal 28 Juli 1966 terdakwa VIII. Marthinus Agustinus Patty, pada tanggal 1 Agustus 1966, terdakwa IX. Thio Hoei Tjoan, dan dengan

suratnya tanggal 1 Agustus 1966 yang diterima pada tanggal 3 Agustus 1966 terdakwa VI. Gatot Hadisuwondo, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi:

1. tanggal Makassar, 10 Agustus 1966 dari Machmud Kahar yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Agustus 1966;
2. tanggal Makassar, 10 Agustus 1966 dari Husen Nud yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Agustus 1966;
3. tanggal Makassar, 9 Agustus 1966 dari Zulkifli Amin yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Agustus 1966;
4. tanggal Makassar, 6 Agustus 1966 dari Jo Tjiong Leng yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Agustus 1966;
5. tanggal Makassar, 10 Agustus 1966 dari Mansjur yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Agustus 1966;
6. tanggal Makassar, 12 Agustus 1966 dari Gatot Hadisuwondo yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Agustus 1966;
7. tanggal Makassar, 10 Agustus 1966 dari Nurdin Kasim yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Agustus 1966;
8. tanggal Makassar, 8 Agustus 1966 dari Marthinus Agusthinus Patty yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Agustus 1966;
9. tanggal Makassar, 11 Agustus 1966 dari Thio Hoei Tjoan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Agustus 1966;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1969 No. 23/1969, dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa

pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan ke pada para penuntut-kasasi masing-masing:

1. Machmud Kahar pada tanggal 27 Juni 1966 dan ia telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 1966, serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 11 Agustus 1966;
2. Husen Nud pada tanggal 27 Juni 1966 dan ia telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 1966, serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 12 Agustus 1966;
3. Zulkifli Amin pada tanggal 27 Juni 1966, dan ia telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 1966, serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 10 Agustus 1966;
4. Jo Tjiong Lieng pada tanggal 8 Juli 1966 dan ia telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 1966, serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 8 Agustus 1966;
5. Mansjur pada tanggal 27 Juni 1966 dan ia telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 1966, serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 11 Agustus 1966;
6. Gatot Hadisuwondo pada tanggal 27 Juni 1966 dan ia telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 1966, serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 16 Agustus 1966;
7. Nurdin Kasim pada tanggal 27 Juni 1966 dan ia telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 1966, serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 11 Agustus 1966;
8. Marthinus Agustinus Patty pada tanggal 7 Juli 1966 dan ia telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 1966 serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 9 Agustus 1966;
9. Thio Hoi Tjoan pada tanggal 27 Juni 1966 dan ia telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 1966 serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 12 Agustus 1966, dengan demikian permohonan kasasi para penuntut-kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para penuntut-kasasi mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, yang mengandung pembebasan para penuntut-kasasi sebagai terdakwa, adalah bertentangan dengan hukum acara

pidana (pasal 6 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951)-;

Menimbang, mengenai keberatan tersebut, bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, seharusnya Pengadilan Tinggi tidak menerima permohonan banding Jaksa tersebut karena bukankah terhadap putusan pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh Jaksa, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembebasan tersebut sebenarnya adalah pembebasan tidak murni (*verkapte ontslag van rechtsvervolging*), hal mana harus diuraikan oleh Jaksa dalam memori banding yang ternyata memori banding tak pernah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Januari 1966 No. 12/1965/PT/Pid. harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Maret 1965 No. 134/1965 Sumir;

Memperhatikan pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pasal-pasal yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari para penuntut-kasasi: 1. *Machmud Kahar*, 2. *Husen Nud*, 3. *Zulkifli Amin*, 4. *Jo Tjong Leng*, 5. *Mansjur*, 6. *Gatot Hadisowondo*, 7. *Nurdin Kasim*, 8. *Marthinus Agusthinus Patty dan Thio Hoei Tjoan* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Januari 1965 No. 12/1965/PT/Pid. tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Maret 1965 No. 134/1965 Sumir;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat ini ke pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 1970 oleh Prof. Subkti, SH, Ketua, Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH dan Busthanul Arifin, SH, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 1970 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Sukito, SH dan Busthanul Arifin, SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Jaksa Agung dan dihadiri oleh Muhjidin Abidin, Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh para penuntut kasasi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MAKASSAR bersidang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat bandingan dalam sidang permusyawaratan, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. *Mahmud Kahar*, umur 44 tahun, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai/Pengamat Pabean tingkat I golongan CC/III yang berada dalam tahanan Polisi sejak tanggal 1 September 1964 sampai sekarang;
- II. *Husen Nud*, umur 43 tahun, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Makassar/Pengamat Pabean golongan CC/II yang berada dalam tahanan Polisi sejak tanggal 1 September 1964 sampai sekarang;
- III. *Zulkifli Amin*, umur 29 tahun, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Makassar/Penilik Pabean golongan E/II, yang berada dalam tahanan Polisi sejak tanggal 22 September 1964 sampai sekarang;
- IV. *Jo Tjong Leng*, umur 23 tahun, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Makassar/Penilik Pabean golongan E/II, yang berada dalam tahanan sejak tanggal 24 September 1964 sampai sekarang;
- V. *Mansjur*, umur 37 tahun, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Makassar/Pengamat Pabean golongan CC/II, yang berada dalam tahanan Polisi sejak tanggal 1 September 1964;
- VI. *Gatot Hadisuwondo*, umur 36 tahun pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai/Penilik Pabean golongan E/II yang berada dalam tahanan Polisi sejak tanggal 1 September 1964 sampai sekarang;
- VII. *Nurdin Kasim*, umur 43 tahun, pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Makassar/Pengamat Pabean tingkat I golongan CC/III, yang berada dalam tahanan Polisi sejak tanggal 1 September 1964 sampai sekarang;
- VIII. *Marthinus Agusthinus Patty*, umur 35 tahun, pekerjaan Pegawai Direktorat Export Cabang Makassar/Pemeriksa Perdagangan Tingkat I golongan D/III, yang berada dalam tahanan Polisi sejak tanggal 16 September 1964 sampai sekarang;
- IX. *Thio Hoei Tjoan*, umur 38 tahun, pekerjaan Agen PN Djakarta Lloyd Cabang Makassar, yang berada dalam tahanan Polisi sejak tanggal 13 September 1964 dan berada di luar tahanan Polisi sejak tanggal 23 September 1964;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat pemeriksaan serta keputusan Pengadilan Negeri di Makassar tertanggal 8 Maret 1965, Pidana No. 134/1965 Sumier, dalam perkara terdakwa tersebut yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan, bahwa terhadap terdakwa-terdakwa:

- I. Mahmud Kahar,
- II. Husen Nud,
- III. Zulkifli Amin,
- IV. Jo Tjong Leng,
- V. Mansjur,
- VI. Gatot Hadisuwondo,
- VII. Nurdin Kasim,
- VIII. Marthinus Agustinus Patty,
- IX. Thio Hoei Tjoan,

pemeriksaan di muka sidang Pengadilan tidak memperoleh bukti-bukti yang syah dan meyakinkan tentang kesalahan mereka atas kejahatan yang dituduhkan pada mereka;

Membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut dari tuduhan di atas ini (Vrijspraak);

Memerintahkan pada Jaksa supaya terdakwa-terdakwa I sampai dengan VIII segera dibebaskan dari tahanan, kecuali jika mereka tetap tinggal dalam tahanan karena lain perkara;

Membebaskan segala ongkos dalam perkara ini pada Negara;

Memerintahkan, supaya barang-barang bukti yang berupa wang kontan Rp.25.000,- (Duapuluh lima ribu rupiah) dikembalikan ke pada saksi Tan Sui Eng alias Otje dan wang kontan Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Firma Lease;

2. Surat catatan yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 1965, Jaksa Abdul Karim, mengajukan permohonan agar supaya perkaranya diperiksa dan diputus dalam tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa walaupun berkas perkara yang dimintakan banding ini sifatnya biasa (summier), tetapi ternyata oleh karena sudah menggemparkan masyarakat, dan termasuk perkara korupsi, dan pula karena diajukan dengan mengindahkan tepat waktu dan cara menurut Undang-Undang maka permohonan bandingan yang diajukan oleh jaksa/penuntut Umum, dapat diterima; sesuai dengan maksud dari pasal 14 Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa-terdakwa Machmud Kahar, Husen Nud, Zulkifli Amin, Jo Tjong Leng, Mansjur, Gatot Hadisuwondo, Nurdin Kasim, Marthinus Agustinus Patty, Thio Hoei Tjoan, dan saksi-saksi Tan Sui Eng alias Otje, Ong Soeng Leng alias Leng Wuiseng, Liem Kiem Seng alias Herman Lie yang semuanya telah disumpah di muka sidang, terdapatlah kenyataan-kenyataan, ialah:

1. bahwa mereka sebagai pejabat dengan adanya export kopra dari PT

Aneka Karya yang akan diangkut oleh kapal Anne Reed, Sam Ratulangi, Setia Budi, yang seharusnya melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang ditugaskan ke pada mereka untuk melakukan penimbangan dan/atau pengawasan terhadap kopra yang akan diekspor itu telah berbuat yang tidak teliti setidak-tidaknya telah berbuat tidak seperti pelaksanaan tugas kewajiban yang seharusnya sebagai pejabat yang telah diberikan ke pada mereka, atau melalaikan suatu perbuatan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

2. bahwa mereka telah menerima wang dari saksi-saksi setelah kapal itu berangkat meninggalkan pelabuhan Makassar, kecuali terdakwa Nurdin Kasim yang belum menerima wang, akan tetapi hanya janji;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 419 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidaklah disyaratkan bahwa hadiah atau janji harus ada pada waktu atau sebelum perbuatan itu dilakukan, akan tetapi cukuplah apabila hadiah atau janji itu diketahuinya untuk menggerakkan supaya ia menjalankan atau melalaikan sesuatu dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya, atau diberikan sebagai akibat berhubung ia telah menjalankan atau melalaikan suatu perbuatan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, pemberian yang berupa wang atau janji yang walaupun diberikan sesudah mereka (terdakwa-terdakwa) selesai menjalankan sesuatu dalam jabatannya, mereka seharusnya patut dapat menduga, bahwa pemberian yang berupa uang atau janji itu diberikan ke pada mereka dalam hubungan dengan wewenangnya sebagai pejabat Bea - Cukai dan Export atau sebagai agen PN Djakarta Lloyd Cabang Makassar yang pada waktu itu melakukan tugas penimbangan dan/atau pengawasan terhadap kopra yang akan diekspor, sehingga dengan itu mereka menjalankan atau melalaikan sesuatu dalam jabatannya yang berlawanan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka (terdakwa-terdakwa), menurut hukum dan keyakinan telah terbukti bersalah yang ditentukan dan diancam oleh pasal 419 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 ditentukan sebagai tindak Pidana Korupsi (pasal 1 sub. c);

Menimbang, bahwa wang sebanyak Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.2.500.000,- (Dua setengah juta rupiah) yang disita sebagai bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa wang itu diperoleh mereka tidak dapat dilepaskan dalam hubungan dengan wewenang mereka sebagai pejabat; sehingga wang itu merupakan sesuatu yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana, maka oleh karena itu harus disita untuk Negara;

Menimbang, akhirnya bahwa, berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan di atas, keputusan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan:

Memperhatikan pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari Jaksa/Penuntut umum tersebut;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Makassar tertanggal 8 Maret 1965, pidana No. 134/1965 (summier) yang dimohonkan peradilan banding itu;
3. Dan dengan memberi keputusan sendiri:
Menyatakan bahwa, terdakwa-terdakwa:

I. *Mahmud Kahar,*

II. *Husen Nud,*

III. *Zulkifli Amin,*

IV. *Jo Tjiong Leng,*

V. *Mansjur,*

VI. *Gatot Hadisuwondo,*

VII. *Marthinus Agusthinus Patty,*

VIII *Thio Hoei Tjoan,*

masing-masing telah bersalah melakukan tindak-pidana korupsi: yang berupa:

“menerima hadiah pada hal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat karena ia tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”;

VII. *Nurdin Kasim,*

telah bersalah melakukan tindak-pidana korupsi yang berupa:

“menerima janji, padahal diketahui bahwa itu diberikan untuk menggerakkan ia supaya tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”;

4. a). Menghukum oleh karena itu ke pada terdakwa-terdakwa:

I. *Mahmud Kahar,*

II. *Husen Nud,*

III. *Zulkifli Amin,*

VI. *Jo Tjiong Leng,*

V. *Mansjur,*

VI. *Gatot Hadisuwondo,*

VIII *Marthinus Agusthinus Patty,*

IX. *Thio Hoei Tjoan,*

masing-masing dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama mereka berada dalam tahanan sementara;

- b). Menghukum terdakwa VII Nurdin Kasim tersebut, dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan, bahwa hukuman ini tidak akan dijalani oleh terdakwa tersebut, kecuali jika kemudian diperintahkan lain dalam suatu putusan pengadilan karena terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan 2 (dua) tahun telah bersalah melakukan suatu perbuatan

pidana;

5. Menetapkan, bahwa barang bukti berupa:

- a). wang kontan sebanyak Rp.25.000,- (Duapuluh lima ribu rupiah),
 - b). wang kontan sebanyak Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah),
- disita untuk Negara;

6. Menghukum para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara;

7. Memerintahkan supaya sehelai turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkara ini dikirim ke pada Ketua Pengadilan Makassar di Makassar;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu, tanggal Duapuluh sembilan Januari 1900 enampuluh enam oleh kami, Indroharto, SH, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, M. Arsjad dan R. Harsadi Darsokusumo, SH, masing-masing Hakim Anggota Pengadilan Tinggi tersebut, dengan dihadiri oleh A. Zainal Abidin P, Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut.